

## Pentingnya Juru Bicara Sebagai Komunikator Politik Pada Presidensi G20 Indonesia

Hotmaida Marttianno Nainggolan<sup>1</sup>, Novi Indah Permatasari<sup>2</sup>, dan Wilda Hikmalia<sup>3</sup>

Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia

Email: [wilda.hikmalia@gmail.com](mailto:wilda.hikmalia@gmail.com)

### ABSTRAK

Juru bicara adalah perwakilan suara dari suatu kelompok, lembaga ataupun organisasi yang dipercaya untuk menyampaikan pesan kepada khalayak ramai. Seorang juru bicara dapat berperan sebagai penasihat, humas maupun komunikator politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya peran juru bicara sebagai komunikator politik pada Presidensi G20 Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Fokus pada penelitian adalah juru bicara, komunikator politik, dan Presidensi G20 Indonesia. Tinjauan pustaka sebelumnya berkaitan dengan juru bicara sebagai komunikator politik menunjukkan pentingnya sosok tersebut dalam pembentukan citra dan kredibilitas tokoh politik yang diwakilkan. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa juru bicara memiliki banyak peran salah satunya sebagai komunikator politik dan peran tersebut sangat penting. Indikator keberhasilan dalam sebuah konferensi politik seperti Presidensi G20 Indonesia berada di tangan juru bicara sebagai komunikator politik. Selain itu ditunjuknya Maudy Ayunda sebagai salah satu tim dalam juru bicara pada Presidensi G20 Indonesia menimbulkan pro dan kontra. Namun, terlepas dari itu peran penting juru bicara tetap harus dilaksanakan dengan baik. Juru bicara pada Presidensi G20 Indonesia akan sangat berpengaruh terhadap kepentingan politik Indonesia di dunia internasional. Untuk itu pemilihan juru bicara yang kompeten serta ahli pada bidangnya dan pembentukan tim juru bicara yang solid dalam Presidensi G20 Indonesia sebagai komunikator politik mempunyai peran sangat penting dalam melaksanakan tugasnya.

**Kata-kata Kunci:** Juru bicara; komunikator politik; presidensi G20 Indonesia

### *The Importance of Spokesperson as Political Communicator in the G20 Presidency Indonesia*

### ABSTRACT

*A spokesperson is a voice representative from a group, institution or organization that is trusted to convey messages to the general public. A spokesperson can act as a advisor, publicist or political communicator. This study aims to determine the importance of the spokesperson's role as a political communicator in the Indonesian G20 Presidency. This research is a descriptive qualitative research with literature study method. The focus of the research is on the spokespersons, political communicators, and the G20 Presidency of Indonesia. The previous literature review regarding the spokesperson as a communicator shows the importance of this figure in shaping the image and political figure represented. The results of this research show that the spokesperson has many roles, one of which is as a political communicator and that role is very important. Indicators of success in political conferences such as the G20 Indonesia Presidency are in the hands of the spokesperson as a political communicator. In addition, the appointment of Maudy Ayunda as one of the spokespersons for the G20 Indonesia Presidency raised pros and cons. But apart from that, the important role of the spokesperson must still be carried out properly. Spokespersons at the G20 Presidency of Indonesia will greatly influence Indonesia's political interests in internationally. For this reason, the selection of competent and expert spokespersons in their fields and the formation of a solid spokesperson team in the G20 Indonesia Presidency as communicators have an important role in carrying out the job desk.*

**Keywords:** Spokesperson; political communicator; G20 presidency Indonesia

### PENDAHULUAN

G20, Kelompok Dua Puluh (*Group of Twenty*) adalah kelompok yang beranggotakan 20

negara di dunia yang mempunyai pertumbuhan perekonomian besar. Anggota G20 terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi,

Argentina, Australia, Brasil, Jepang, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Rusia, Prancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa, (Rohman, 2021). Kelompok ini dibentuk tanggal 26 September 1999, awal mulanya adalah wadah kerja sama multilateral yang fokusnya pada penanganan perekonomian serta keuangan global. G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global dan 80% PDB dunia, (Indonesia.go.id, 2021).

Tujuan dari pembentukan G20 ini adalah inisiasi dari anggota G7 (Inggris, Kanada, Jerman, Prancis, Jepang, Italia, dan Amerika Serikat) untuk mendekap negara maju dan juga negara berkembang agar dapat bahu-membahu mengatasi krisis terutama yang menimpa negara-negara di Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Pada tahun 1998 sampai 1999 terjadi puncak dalam pencarian solusi terhadap krisis keuangan global sehingga G7 dianggap gagal dan tidak efektif. Maka dengan terbentuknya G20 ini diharapkan pertumbuhan serta penguatan pertumbuhan global terus berlanjut, seimbang, dan menyeluruh.

Sejak awal terbentuknya G20 tahun 1999, Indonesia langsung bergabung sebagai anggota. Bahkan Indonesia tercatat sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang tergabung sebagai anggota G20 sejak awal terbentuknya. Posisi Indonesia di G20 cukup strategis. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dianggap cukup pesat dan berada di atas rerata pertumbuhan ekonomi global, yang akhirnya menjadikan Indonesia sebagai Presidensi

G20. Kesempatan ini merupakan peluang baik untuk dapat menunjukkan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional.

Pada tanggal 30-31 Oktober 2021 Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo secara resmi menerima jabatan sebagai Presidensi G20 dari Mario Draghi selaku Perdana Menteri Italia pada penutupan KTT G20 Roma 2021. Setelahnya, sejak tanggal 1 Desember 2021 Presidensi G20 di Indonesia resmi dimulai. Ini adalah momen bersejarah bagi Indonesia. Hal itu disebabkan pertama kalinya Presidensi G20 dipegang oleh Indonesia. Presidensi G20 Indonesia sudah terselenggara sejak akhir tahun 2021 dan akan mencapai puncak perhelatannya pada Oktober 2022 mendatang pada KTT yang akan diselenggarakan di Bali.

Presidensi G20 Indonesia menjadi perhatian khusus bagi pemerintah agar peran Indonesia dalam ajang tersebut dapat didengar secara global oleh para anggota lainnya. Artinya komunikasi global perlu ditingkatkan agar kapasitas dan legitimasi menjadi kuat terhadap manfaat G20. Untuk menyukseskan Presidensi G20, pemerintah mengambil langkah-langkah penting yang salah satunya adalah pembentuk tim juru bicara dalam perhelatan G20 ini.

Menurut McNair (2011) dalam Alvin (2020) juru bicara adalah pria atau wanita yang memiliki kompetensi untuk menjadi perwakilan seorang aktor politik maupun organisasi politik dan memiliki wewenang untuk berbicara. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2022) juru

bicara adalah orang yang kerjanya memberi keterangan resmi dan sebagainya kepada umum; pembicara yang mewakili suara kelompok atau lembaga; penyambung lidah. Dari kedua definisi ini dapat diartikan juru bicara memiliki peranan sebagai seorang wakil untuk menyuarakan sesuatu kepada orang lain. Lebih lanjut menurut Seitel (2015) dalam Alvin (2020) seorang juru bicara tidak hanya sekadar penyambung lidah, melainkan ia juga harus mempercayai keputusan yang diambil oleh pimpinannya itu.

Dalam dunia politik, seorang juru bicara merupakan komunikator politik. Komunikator politik adalah mereka yang memiliki peran penting dan rentan dalam lingkup sosial, serta merespon bermacam-macam tekanan dengan cara menampik serta mempunyai keahlian memilah informasi secara menyeluruh dalam tatanan sosial di dunia perpolitikan. Komunikator politik memerankan tokoh utama dalam proses opini publik. Mereka tidak saja berasal dari kalangan politikus, tetapi dapat juga dari kalangan profesional dan aktivis. Juru bicara termasuk dalam komunikator politik yang biasanya berasal dari kalangan aktivis.

Komunikator politik adalah orang atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan politik yang biasanya berkaitan dengan kekuasaan pemerintah, kebijakan pemerintah, aturan pemerintah, kewenangan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi khalayak baik itu verbal atau nonverbal, (Gantiano, 2018). Juru bicara sebagai komunikator politik memainkan

peran dalam pembentukan opini publik. Komunikator politik yang berasal dari kalangan politikus menduduki ataupun berambisi untuk menduduki suatu jabatan dalam lingkup sosial, kemudian dari kalangan profesional akan memainkan perannya dalam lingkup media massa dan media khusus atau menjadi penghubung antara media dengan kantor milik pemerintah. Sedangkan komunikator politik dari kalangan aktivis biasanya hanya terlibat dalam jaringan media yang berupa saluran-saluran organisasional dan interpersonal.

Nimmo (2011) menjelaskan juru bicara lazimnya tidak memegang atau mencita-citakan jabatan pada pemerintahan, bukan seorang politikus dan juga bukan profesional dalam komunikasi. Seorang juru bicara terlibat di dua bidang yakni politik dan komunikasi, sebab itulah mereka disebut sebagai aktivis politik dan juga sebagai semiprofesional dalam bidangnya di komunikasi politik. Mereka akan berkomunikasi untuk kepentingan yang terorganisasi yaitu sebagai wakil dalam memenuhi tuntutan para anggota dalam suatu organisasi dan bernegosiasi yang bertujuan mendapatkan keuntungan. Kemudian, juru bicara akan melaporkan hasil keputusan dan kebijakan tersebut kepada para anggota organisasi.

Pada Presidensi G20 2022 yang dipimpin oleh Indonesia mengusung tiga isu sebagai prioritas, yaitu; (1) Arsitektur Kesehatan Global yang Inklusif, (2) Transformasi berbasis Digital dan (3) Transisi Energi Berkelanjutan. Untuk menyampaikan informasi itulah pemerintah

membentuk Tim Juru Bicara bukan hanya terpusat pada satu orang. Seperti yang diberitakan oleh [kominfo.go.id](http://kominfo.go.id) pada Jumat, 8 April 2022, juru bicara Kominfo RI yakni Deddy Permadi menyatakan bahwa tim juru bicara Presidensi G20 Indonesia sangat penting dalam rangka menyampaikan informasi sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Diharapkan dengan adanya tim juru bicara ini masyarakat akan lebih paham mengenai perhelatan tersebut dan dapat mendukungnya.

Salah satu juru bicara yang berhasil melakukan perannya dalam bidang politik adalah Husain Abdullah yang ditunjuk sebagai juru bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla sejak masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden pada tahun 2004-2009 sampai dengan era Joko Widodo, tahun 2014-2019. Husain Abdullah mengenyam pendidikan Hubungan Internasional di Universitas Hasanudin lalu mendapatkan gelar magister untuk Ilmu Komunikasi dari Universitas yang sama, beliau mempunyai kemampuan menjadi komunikator politik yang handal.

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Silvanus Alvin pada tahun 2020, selama menjabat sebagai juru bicara Wakil Presiden, Husain menerapkan strategi komunikasi politik. Pertama, menciptakan citra Wakil Presiden yang ingin dipertahankan di masyarakat yaitu Jusuf Kalla dikenal sebagai tokoh perdamaian dan negarawan. Kedua, menentukan publik sasaran yakni untuk mengedukasi publik dalam menghadapi isu tertentu.

Setelah kedua strategi tersebut dibentuk, maka Husain dapat melaksanakan fungsi komunikasi dan fungsi proteksi untuk mempertahankan gambaran Jusuf Kalla seperti yang dikenal oleh publik sasaran. Jika Jusuf Kalla tidak dapat hadir dalam suatu konferensi pers, maka Husain adalah penggantinya dan semua unggahan di media sosial Jusuf Kalla harus seizin Husain. Fungsi proteksi, sebagai tokoh negara tentunya mudah bagi Jusuf Kalla tertimpa isu negatif dan dapat meruntuhkan citra yang telah dibangun. Sebagai juru bicara, Husain harus melakukan proteksi agar hal-hal tersebut tidak berkelanjutan salah satunya adalah dengan memberikan klarifikasi baik melalui pers atau media sosial mengenai isu terkait.

Selama bertugas sebagai juru bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah dapat dikatakan sebagai juru bicara yang berhasil. Selain ditunjuk selama dua periode Jusuf Kalla menjabat, isu besar yang menyebutkan bahwa Kalla bernafsu untuk terus berkuasa pernah menimpanya juga dapat diselesaikan dengan baik oleh Husain. Dalam beberapa kesempatan, Husain memutuskan untuk tampil wawancara di TV tanpa seizin Jusuf Kalla karena memang dalam menjalankan tugas ini, Husain diberikan kebebasan oleh Jusuf Kalla sebagai juru bicara. Hal tersebut ditempuh oleh Husain untuk meluruskan isu yang bergulir di masyarakat sehingga citra Jusuf Kalla sebagai tokoh perdamaian dan negarawan tetap dipertahankan.

Pemilihan juru bicara dalam berbagai kegiatan dilakukan dengan banyak pertimbangan. Seperti yang dilakukan oleh Jusuf Kalla dalam memilih Husain sebagai juru bicara dan mempercayakan penuh tugas tersebut padanya. Begitupun dalam Presidensi G20 Indonesia, keseriusan dalam pembentukan tim juru bicara ditempuh oleh pemerintah sehingga dapat membagi tugas sesuai dengan masing-masing isu yang diusung. Dalam siaran pers Kominfo No. 132/HM/KOMINFO/04/2022 dijelaskan bahwa tugas sebagai juru bicara dalam perhelatan tersebut tidak akan ditanggung oleh satu orang saja. Nama-nama yang tidak asing dalam bidang perekonomian muncul dalam usulan pembentukan tim juru bicara perhelatan ini. Dikutip dalam laman Kominfo melalui Siaran Pers No. 23/HM/KOMINFO/01/2022 pada Senin, 24 Januari 2022, tim juru bicara untuk Jalur Sherpa (*Sherpa Track*) akan diketuai oleh Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri. Untuk Jalur Keuangan (*Finance Track*) juru bicaranya adalah Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan dan Perry Warjiyo selaku Wakil Ketua oleh Gubernur Bank Indonesia. Sedangkan untuk komunikasi umum dilakukan secara langsung oleh Johnny Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika dan secara khusus untuk komunikasi isu-isu terkait dengan kebijakan presiden dilakukan oleh Moeldoko selaku Kepala Staf Presiden.

Ternyata tidak cukup nama-nama besar dari pemerintahan, Ayunda Faza Maudya, B.A., M.A., M.B.A. atau yang dikenal dengan Maudy Ayunda ditunjuk menjadi jajaran tim juru bicara. Maudy Ayunda adalah seorang aktor, penyanyi, model, dan penulis. Lulusan Oxford University, Inggris dan Stanford University, California ini diharapkan mampu mengirimkan pesan kepada khalayak luas, terutama para generasi Z dan kaum milenial mengenai perhelatan ini. Dalam Siaran Pers No. 119/HM/KOMINFO/03/2022 pada Kamis, 31 Maret 2022, Menteri Kominfo menjelaskan tentang dua peran Maudy Ayunda dalam Presidensi G20 Indonesia dan meyakini bahwa penunjukan Maudy yang fasih dalam penggunaan beberapa bahasa asing akan membantunya ketika bertugas sebagai juru bicara.

Penunjukan Maudy Ayunda sebagai bagian tim juru bicara Presidensi G20 Indonesia, menyulut pro dan kontra di tengah masyarakat. Tidak hanya di dalam negeri, kritik pedas terhadap Maudy Ayunda sebagai tim juru bicara juga ditunjukkan oleh beberapa media asing. Dikutip dari laman artikel Bloomberg yang berjudul "*G-20 Role for 27-Year-Old Indonesia Singer Sparks Criticism*" disebutkan bahwa Maudy dianggap tidak mempunyai pengalaman cukup di bidang diplomasi dan ekonomi. Media tersebut bahkan menyebut bahwa penunjukan Maudy sebagai generasi muda dianggap sebagai *gimmick* dan tidak mempunyai fungsi yang strategis.

Pada Presidensi G20 Indonesia, diharapkan juru bicara terpilih dapat mewakili forum

internasional untuk dapat mengenalkannya lebih luas kepada seluruh lapisan masyarakat. Banyak masyarakat Indonesia yang dulunya tidak mengetahui tentang Presidensi G20 Indonesia, namun sejak penunjukan Maudy Ayunda menjadi tim juru bicara, G20 mulai banyak dijadikan bahan perbincangan. Entah karena ketenaran juru bicara yang adalah seorang *public figure* atau memang peran juru bicara yang ditunjuk menjalankan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan berbagai keresahan yang telah dijabarkan, maka peneliti merangkum batasan permasalahan yang akan diurai menjadi fokus pada penelitian ini yaitu; (1) Bagaimana peran juru bicara sebagai komunikator politik? (2) Bagaimana peran juru bicara dalam Presidensi G20 Indonesia? dan (3) Seberapa penting juru bicara dalam Presidensi G20 Indonesia? Peneliti akan membedah secara mendalam pentingnya seorang figur juru bicara dalam menunjang pemahaman politik pada Presidensi G20 Indonesia. Untuk selanjutnya semoga pemaparan dalam penelitian ini juga dapat bermanfaat dan dipraktikkan secara langsung pada peran juru bicara sebagai komunikator politik dan diharapkan dengan perumusan masalah ini akan membuat penelitian ini menjadi lebih fokus dan mendapat jawaban terhadap keresahan peneliti.

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka sebagai teknik dalam pengumpulan data. Menurut

Mulyana (2018) penelitian kualitatif secara sederhana diartikan sebagai penelitian yang bersifat interpretif (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode dalam menelaah penelitiannya. Lebih lanjut Creswell (2003) dalam Pertiwi (2020) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Metode studi pustaka menurut Hart (1998) dalam Aldianto et. Al. (2018) adalah pemilihan dokumen yang tersedia (baik yang diterbitkan dan tidak dipublikasikan) pada topik, yang berisi informasi, ide, data dan bukti yang ditulis dari sudut pandang tertentu untuk memenuhi tujuan tertentu atau mengungkapkan pandangan tertentu pada topik tersebut, bagaimana menyelidikinya, dan evaluasi efektif dari dokumen-dokumen ini dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Metode ini digunakan karena Presidensi G20 Indonesia yang masih dalam proses pelaksanaan hingga puncak kegiatannya pada KTT Bali yang dijadwalkan berlangsung tanggal 15-16 November 2022 mendatang, maka studi pustaka dari berbagai media baik dalam maupun luar negeri menjadi data primer dalam penelitian ini. Diharapkan dengan berbagai sumber pustaka akan memberikan jawaban dari keresahan peneliti mengenai pentingnya juru bicara dalam Presidensi G20 Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhelatan G20 merupakan kali pertama Indonesia memegang presidensi. Sebagai forum multilateral strategis yang menjadi penghubung antar negara anggota yang memiliki perekonomian besar di dunia memiliki peran penting dalam menentukan masa depan pertumbuhan ekonomi dunia. Seperti ditulis dalam laman [g20.org](http://g20.org), hal tersebut dikarenakan para anggota G20 secara kolektif merepresentasikan lebih dari 80% perekonomian dunia, 75% perdagangan internasional dan 60% populasi dunia.

Tiga isu prioritas dalam Presidensi G20 yang telah dikemukakan sebelumnya, dianggap cukup kompleks untuk dibahas sehingga Indonesia sebagai pemegang presidensi memerlukan beberapa juru bicara yang memahami isu-isu yang terkait. Seperti dipaparkan Dedy Permadi, tugas juru bicara Presidensi G20 Indonesia tidak akan diampu oleh satu orang saja, melainkan diemban bersama oleh tim juru bicara. Dengan beberapa orang yang tergabung dalam tim, secara individu memiliki kemampuan dalam mengolah dan menginformasikan isu yang perlu disampaikan kepada masyarakat sehingga mereka miliki peran masing-masing. Secara lebih lanjut akan dibahas pada paparan berikut:

### 1. Peran Juru Bicara Sebagai Komunikator Politik

Seperti yang telah dibahas pada pendahuluan mengenai peran juru bicara dalam suatu organisasi baik profit maupun pemerintahan yaitu sebagai wakil

yang menginterpretasikan suatu pesan kepada khalayak ramai. Secara umum, seorang juru bicara hanya berurusan dengan masyarakat tertentu yaitu mereka yang memiliki kepentingan terhadap suatu organisasi, sedangkan juru bicara pemerintahan diperuntukan melayani seluruh masyarakat di dalam negara tersebut. Dalam ranah politik seorang juru bicara dikenal sebagai komunikator politik yang berasal dari kalangan aktivis. Mereka harus mengetahui dengan pasti segala seluk beluk mengenai informasi yang akan disampaikan sehingga dapat diterima dengan baik. Dikutip dari Alvin (2020) dalam penelitian yang berjudul Strategi Komunikasi Politik Juru Bicara Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) 2014-2019 sebagai Humas Pemerintah yaitu:

*“Penyampaian informasi kepada masyarakat dan juga penyerapan informasi masyarakat tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Sebab, hal tersebut dapat memberikan imej yang buruk terhadap pemerintah. Apabila mendapat imej buruk, bukan tidak mungkin pemerintah itu kehilangan legitimasinya atau kepercayaan dari masyarakat”.*

Terlihat jelas bahwa juru bicara memiliki peran penting dalam penyampaian informasi sehingga pesan tersampaikan sesuai dengan maksud dari organisasi yang diwakilkan olehnya. Sejalan dengan kutipan tersebut dalam SIARAN PERS NO. 132/HM/KOMINFO/04/2022 pada Jumat, 08 April 2022 yang ditampilkan di laman KOMINFO, juru bicara KOMINFO menegaskan bahwa tim juru bicara Presidensi G20 Indonesia sangat penting dalam rangka menyampaikan informasi sejelas-jelasnya

kepada masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam ungkapan Dedy Permadi sebagai juru bicara KOMINFO: “*Dengan mendapatkan pemahaman yang baik, diharapkan masyarakat dapat turut serta mendukung perhelatan Presidensi G20 yang merupakan momen penting dan bersejarah bagi Indonesia*”.

Menurut Handayani (2013) keberhasilan seorang komunikator dapat dilihat dari seberapa besar ketertarikan khalayak kepadanya sehingga mereka mau mendengarkan dan mengikuti pesan-pesan yang disampaikannya. Untuk dapat dikatakan berhasil maka seorang komunikator seharusnya mempunyai daya pesona yang menarik dan juga kredibilitas yang handal. Dengan keahlian itu maka khalayak akan tertarik dan percaya atas pesan-pesan yang disampaikan karena mereka merasa memiliki persamaan rasa dengan sang komunikator.

Pada masa pemerintahan Presiden Keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono memiliki dua orang juru bicara yaitu Andi Malarangeng dan Dino Patti Djalal. Bukan tanpa alasan pemilihan kedua juru bicara tersebut membantu presiden dalam komunikasi politiknya dalam lingkup kepresidenan sesuai dengan permasalahannya. Dalam Indrawan (2018) pembagian tugas juru bicara tersebut yaitu Andi Malarangeng sebagai juru bicara khusus masalah-masalah dalam negeri dan Dino Patti Djalal sebagai jubiir khusus masalah-masalah luar negeri. Hal ini mempertegas bahwa juru bicara memiliki kewenangan untuk mengutarakan hal-hal yang menyangkut berbagai persoalan yang dipercayakan

padanya. Masih dalam Indrawan (2018) mengutip pernyataan Andi Malarangeng:

*“Juru bicara harus menjadi seorang generalis, yaitu harus mengerti segala hal yang berhubungan dengan peran negara untuk mengaturnya”.*

Namun, untuk menyampaikan materi-materi yang bersifat dasar atau fundamental yang berkaitan langsung dengan rakyat, Presiden memilih melakukan komunikasi politiknya sendiri.

G20, Kelompok Dua Puluh (*Group of Twenty*), merupakan kelompok yang beranggotakan 20 negara di dunia yang mempunyai pertumbuhan perekonomian besar, dan Indonesia pertama kali memegang Presidensi G20 (Kemenlu, 2022). Sebagai perhelatan besar yang mengusung beragam pembahasan isu dan dinilai cukup kompleks, maka juru bicara dalam Presidensi G20 Indonesia ini tidak hanya satu orang melainkan tim yang mengerti tentang berbagai isu tersebut. Dalam SIARAN PERS NO. 132/HM/KOMINFO/04/2022, juru bicara Kominfo menjelaskan:

*“Jadi pada Presidensi G20 Indonesia, tugas juru bicara tidak dibebankan pada satu orang saja, melainkan tim juru bicara”.*

Tugas tim juru bicara dalam Presidensi G20 Indonesia dibagi berdasarkan kesesuaian dengan bidang yang dikuasai secara individu oleh para juru bicara. Isu mengenai *Working Group* (WG) dan *Engagement Groups* (EG) juru bicara diperankan oleh para *chair* dan *co-chair* masing-masing. Untuk menjelaskan informasi yang berkaitan dengan kebijakan krusial kepada media dan masyarakat dilakukan oleh Ketua Jalur Track yaitu Airlangga

Hartarto selaku Menko Bidang Perekonomian bersama dengan Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri. Ketua Jalur Keuangan yaitu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan bersama dengan Perry Warjiyo selaku Gubernur Bank Indonesia. Kemudian diharapkan adanya perluasan informasi mengenai perhelatan untuk menjangkau khalayak secara menyeluruh terutama para Generasi Z dan kaum Milenial, maka tim juru bicara diperkuat oleh seorang tokoh masyarakat yaitu Maudy Ayunda.

Dari pembahasan di atas, maka terlihat peran juru bicara dalam sebuah organisasi baik itu organisasi dengan profit maupun organisasi pemerintah. Terlihat dari pemilihan dua juru bicara kepresidenan era Susilo Bambang Yudhoyono dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang akan disampaikan, begitu pula dengan Presidendi G20 Indonesia. Secara khusus pemerintah membentuk tim juru bicara untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan isu yang dikuasai oleh masing-masing juru bicara secara individu. Pemilihan tim juru bicara ini bukan tanpa alasan, tetapi bertujuan untuk menyukseskan perhelatan tersebut yang mencapai puncak kegiatan pada KTT Bali yang dijadwalkan berlangsung tanggal 15-16 November 2022.

Diungkapkan oleh Maudy Ayunda dalam konferensi pers pada Kamis, 31 Maret 2022 di Istana Negara, *“Keberhasilan Presidensi G20 Indonesia akan menjadi catatan sejarah yang membanggakan, hasil konkrit dari pembahasan ketiga isu prioritas akan membawa perubahan kehidupan kita yang lebih baik.”*

## 2. Strategi Pemerintah dalam Pembentukan Tim Juru Bicara Presidensi G20 Indonesia

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, G20 merupakan forum multilateral strategis yang anggotanya adalah negara-negara yang memiliki perekonomian besar di dunia.

Forum G20 memegang posisi strategis dalam menentukan masa depan tumbuhnya perekonomian dunia karena 80% anggotanya merupakan Produk Domestik Bruto (PDB) dunia, kemudian diisi oleh perdagangan internasional 75% dan terakhir 60% populasi dunia. Indonesia untuk pertama kalinya memegang Presidensi Group of 20 (G20). Semangat pulih bersama yang diusung dalam G20 kali ini bertemakan *“Recover Together, Recover Stronger”*, maka penyelenggaraannya difokuskan pada tiga sektor yang diutamakan dan dinilai menjadi kunci dalam pemulihan yang kuat dan berkelanjutan, yaitu; (1) Penguatan arsitektur kesehatan global, (2) Transformasi digital, dan (3) Transisi energi.

Perhelatan Presidensi G20 Indonesia ini menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Menkominfo seperti yang tertulis dalam laman Kominfo pada Senin, 24 Januari 2022 *“Kami mendiskusikan beberapa kebijakan yang berkaitan atau menindaklanjuti Instruksi Bapak Presiden yaitu strategi komunikasi G20 harus dilakukan secara masif, baik di dalam negeri dan untuk masyarakat internasional. Jadi hari ini kami mengambil beberapa keputusan, yang pertama usulan penunjukkan juru bicara.”*

Lebih lanjut, pada siaran pers di hari sama, Menkominfo memaparkan usulan nama-nama yang

akan menjadi tim juru bicara dalam G20. Usulan tersebut akan dibentuk sesuai dengan isu yang akan dibahas antara lain untuk Jalur Keuangan (*Finance Track*) juru bicaranya adalah Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan dan Perry Warjiyo selaku Gubernur Bank Indonesia. *Finance track* atau Jalur Keuangan adalah jalur yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan secara khusus. Untuk membahas isu yang menjadi fokus pada jalur ini adalah para tokoh yang berkecimpung di bidangnya antara lain masing-masing menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari setiap negara anggota, yang selanjutnya dibahas pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). Seperti yang dikutip oleh Asmarani (2022) dari Badan Kebijakan Fiskal (2021), sudah jelas fokus utama dalam jalur ini adalah perekonomian dan keuangan, contohnya perkenomian global, moneter dan kebijakan fiskal, sektor keuangan, investasi infrastruktur, inklusi pada keuangan, serta perpajakan internasional. Pemerintah mempercayai Menkeu dan Gubernur Bank Indonesia sebagai juru bicara yang dianggap kompeten dalam membahas isu tersebut.

Jalur lainnya dalam G20 yaitu jalur sherpa yang dipimpin oleh Airlangga Hatarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri. Jalur ini akan mengulas isu terkait ekonomi nonkeuangan dan mempersiapkan berbagai konsep dokumen yang akan dibahas pada Konferensi Tingkat Tinggi (Badan Kebijakan Fiskal, 2021 dalam Asmarani, 2022). Sherpa menjadi nama jalur dalam G20 diambil dari salah satu nama suku Nepal yang ada di Gunung

Himalaya yang biasanya menjadi pemandu para pendaki untuk mencapai puncaknya. Penamaan ini menggambarkan yang terlibat dalam jalur Sherpa G20 ini sebagai pembuka jalan untuk menuju ke KTT yang nantinya akan dihadiri oleh masing-masing kepala negara anggota G20.

Fokus dalam jalur ini jauh lebih kompleks dibandingkan dengan jalur keuangan antara lain di bidang pariwisata, pembangunan, antikorupsi, energi, perdagangan, perubahan iklim, kesehatan, kesetaraan gender, dan isu lainnya maka juru bicara dipercayakan tidak hanya pada Menko Bidang Perekonomian tetapi juga didampingi oleh Menlu.

Selanjutnya untuk juru bicara yang terkait dengan komunikasi umum akan dipegang secara langsung oleh Johnny Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika. Dikutip dari laman Kominfo pada tanggal 26 November 2021 sebagai koordinator dalam bidang komunikasi serta media yang bertugas mengatur pengeksekusian komunikasi adalah Kementerian Kominfo. Maka penyampaian informasi yang akan diterima oleh masyarakat diharapkan seakurat mungkin, jelas dan juga terpercaya, terlebih untuk masalah nasional dan masalah global yang kemudian akan diulas nantinya pada penyelenggaraan puncak G20 pada tahun 2022.

Sedangkan untuk komunikasi mengenai isu-isu terkait dengan kebijakan presiden dilakukan oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko. Seperti yang amanat presiden yang tertulis dalam Kepres Nomor 12 dan Kepres Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perhelatan G20, Kominfo akan bekerja sama dengan kementerian lainnya terkait

aktivitas komunikasi publik dan layanan media. Kantor Staf Presiden memiliki tugas yaitu mengatur manajemen isu dan juga manajemen krisis yang termasuk pada komunikasi publik dan komunikasi politik.

Seiring berjalannya waktu, pada 31 Maret 2022 Kominfo menunjuk satu perwakilan sebagai tim juru bicara yaitu Maudy Ayunda. Strategi pemerintah untuk menyukseskan Presidensi G20 Indonesia di seluruh lini masyarakat diperkuat dengan penunjukkan Maudy Ayunda tersebut. Sebagai seorang aktor, model, penyanyi dan *public figure*, Maudy diharapkan dapat menyampaikan euforia perhelatan ini kepada generasi Z dan milenial. Menurut Menkominfo pemilihan juru bicara ini dinilai dapat membantu masyarakat untuk mengetahui informasi terkait rangkaian Indonesia sebagai pemimpin dalam Forum G20.

Ditunjuknya Maudy Ayundy sebagai tim juru bicara memperlihatkan upaya pemerintah menggunakan kesempatan Presidensi G20 Indonesia untuk mengedepankan kepentingan rakyat. Guna menyukseskan peran Indonesia dalam kepemimpinannya di Presidensi G20, pemerintah tentunya harus melakukan promosi serta sosialisasi mengenai perhelatan ini secara maksimal dan terus-menerus. Hal ini secara khusus tertuang dalam pernyataan berikut, "*Kita harapkan nanti dengan demikian komunikasi publik menjadi lebih baik, bisa menjangkau masyarakat di dalam negeri lebih luas dan masyarakat luar negeri. Juga tentu kita berharap kolaborasi dari media baik media nasional maupun media internasional yang berkaitan dengan semua*

*sektor dan aspek yang dibicarakan di G20 Summit nanti,*" (Johnny F. Plate, 2022).

### 3. Pentingnya Juru Bicara dalam Presidensi G20 Indonesia

Penelitian sebelumnya yang membahas mengenai peran juru bicara politik telah dilakukan oleh Silvanus Alvin tahun 2020 yang menjelaskan strategi komunikasi politik yang dijalankan oleh juru bicara Wakil Presiden yakni Jusuf Kalla tahun 2014-2019 sebagai Humas Pemerintah. Husain Abdullah adalah juru bicara politik yang ditunjuk oleh Jusuf Kalla sejak beliau menjabat Wakil Presiden dari Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo. Dalam penelitian tersebut dijelaskan strategi yang diterapkan oleh Husain adalah menciptakan citra politik Jusuf Kalla karena citra wakil presiden dapat mempengaruhi citra pemerintahannya yang sedang dipimpin dimana ingin menunjukkan bahwa Jusuf Kalla sebagai tokoh perdamaian. Setelah citra tersebut dibentuk, maka Husain menentukan publik sasarannya. Beliau berbicara kepada audiens atau publik masing-masing berbeda tergantung isu. Misal isu mengenai masalah kelistrikan hanya masyarakat tertentu saja yang *concern*, lainnya kadang tidak peduli.

Husain bahkan menerima keleluasaan dari Jusuf Kalla untuk menjadi juru bicara dalam menjalankan fungsinya di dalam istana negara untuk melakukan fungsi komunikasi dan fungsi proteksi. Fungsi komunikasi yaitu untuk memberikan informasi baik secara verbal melalui wawancara pers atau non verbal seperti mengatur konten di media sosial Wakil Presiden. Untuk komunikasi yang dilakukan melalui

wawancara pers, juru bicara diwajibkan untuk memberikan informasi yang sama sesuai dengan pernyataan Wakil Presiden sedangkan untuk konten media sosial, Husain diberikan kebebasan untuk mengatur tanpa perlu izin dari Jusuf Kalla.

Selanjutnya adalah fungsi proteksi yaitu untuk melindungi Wakil Presiden dari terpaan isu negatif yang dapat menyerang. Caranya yaitu dengan melakukan klarifikasi di berbagai media jika diperlukan. Seperti yang pernah terjadi sebelumnya bahwa Jusuf Kalla diisukan sebagai tokoh yang haus kekuasaan. Husain dengan berani tampil wawancara di Kompas TV melakukan klarifikasi atas isu yang bergulir. Hasilnya citra yang dibuat diawal yaitu tokoh perdamaian tetap dipertahankan.

Penelitian lain sehubungan dengan tim juru bicara telah dilakukan pula oleh Raden Mas Jerry Indrawan tahun 2018 yang meneliti tentang komunikasi politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengangkat dua orang sekaligus sebagai tim juru bicaranya yang tak lain adalah Andi Alfian Malarangeng yang khusus menangani permasalahan dalam negeri dan Dino Patti Djalal yang khusus menangani permasalahan luar negeri. Menyangkut tugas juru bicara saat itu, tidak semua permasalahan negara yang berhubungan dengan khalayak umum menjadi sepenuhnya tugas juru bicara. Pembagian tugas diberikan kepada presiden, juru bicara dan pejabat terkait. Andi Malarangeng menjelaskan bahwa saat melakukan konferensi pers dan isunya terkait hal dasar yang berhubungan dengan rakyat, akan langsung dilakukan oleh presiden. Namun bagaimanapun tugas yang diemban oleh

presiden, juru bicara dan menteri dalam memberikan informasi harus mampu menjangkau semua segmentasi masyarakat.

Dari dua kasus di atas, terlihat bahwa tugas juru bicara lazimnya tidak hanya diampu oleh satu orang namun berupa tim yang solid karena semua informasi yang keluar dari juru bicara merepresentasikan citra pemerintah kepada khalayak umum. Dalam Presidensi G20 Indonesia juga melakukan strategi yang sama yaitu dengan melakukan penunjukan kepada sejumlah orang untuk menjadi tim juru bicara pada Presidensi G20 dengan tugas dan keahliannya masing-masing di bidangnya.

Juru bicara pada bagian finansial (*Finance Track*) pemerintah Indonesia menunjuk Sri Mulyani yang merupakan Menteri Keuangan dan Perry Warjiyo yang adalah Gubernur Bank Indonesia sebagai juru bicara pada Presidensi G20. Pada laman resmi Presidensi G20 Indonesia, menyebutkan bahwa selama periode G20 Indonesia, dalam jalur keuangan akan membahas 6 agenda prioritas antara lain: (1) Penanganan Krisis, (2) Arsitektur Keuangan Internasional, (3) Perdagangan Internasional, (4) Pengembangan Infrastruktur, (5) Perpajakan Internasional, dan (6) Penguatan Global Partnership.

Pada jalur non-keuangan yaitu Jalur Sherpa atau *Sherpa Track* dipimpin oleh Airlangga Hartarto yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Retno Marsudi selaku Menteri Luar Negeri. Mereka bertanggung jawab untuk memimpin analisis mendalam tentang berbagai masalah internasional yang relevan. Beberapa hal yang akan menjadi tanggung jawab keduanya adalah

antara lain: (1) Agrikultur, (2) Ekonomi Digital, (3) Pendidikan, (4) Ketenagakerjaan, (5) Pariwisata, (6) Pembangunan, (7) Transisi Energi, (8) Lingkungan dan Berkelanjutan Iklim, (9) Perdagangan, Investasi dan Industri, (10) Anti-Korupsi, (11) Kesehatan, dan (12) Inisiatif EMPOWER dan Pemberdayaan Perempuan.

Selanjutnya, sebagai juru bicara yang berkaitan dengan komunikasi umum dilakukan langsung oleh Johnny Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika termasuk juga Maudy Ayunda yang akan melakukan kontribusi untuk merangkul Generasi Z dan para millenials untuk turut berperan serta dalam Presidensi G20. Dua tugas utamanya adalah yaitu: (1) Menginformasikan berbagai hal terkait pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Indonesia yang nantinya akan dihadiri oleh para kepala negara dan kepala pemerintahan anggota G20, dan (2) Mempersiapkan perkembangan pada pertemuan-pertemuan *working group*, *engagement group* dan *side events* pada Presidensi G20 Indonesia secara berkala dan rutin, sehingga masyarakat Indonesia dan juga masyarakat dunia dapat mengikuti perkembangan dan substansi berbagai agenda perhelatan ini.

Juru bicara untuk kepresidenan pada Presidensi G20 Indonesia diketuai oleh Moeldoko yang mengemban tugas sebagai pengelola terkait manajemen isu serta manajemen krisis. Termasuk di dalamnya Moeldoko juga mengemban amanat sebagai komunikator yang berkaitan dengan komunikasi publik dan tentu juga perihal komunikasi politik.

Juru bicara pada Presidensi G20 adalah komunikator politik yang ditunjuk negara sesuai dengan keahliannya, agar dapat membantu pemerintah untuk memberikan citra baik terhadap Indonesia oleh negara-negara anggota G20 dan juga dalam menyampaikan informasi resmi mengenai pelaksanaan forum tersebut kepada masyarakat. Johnny G Plate dalam Rapat Koordinasi Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara Presidensi G20 Tahun 2022 di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (25/11/2021) menyebutkan bahwa pemerintah sudah membagi masing-masing tugas, sehingga diharapkan pesan yang diberikan tidak amburadul, kesan yang tersurat jelas, tidak kacau, tidak rusuh. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah konsisten dan berusaha agar Presidensi G20 ini dapat memberikan imej baik bagi Indonesia dimata dunia dan masyarakat Indonesia sebagai tuan rumah pada forum internasional tersebut.

## SIMPULAN

Secara umum, seorang juru bicara adalah perwakilan suara dari suatu kelompok, lembaga ataupun organisasi yang dipercaya untuk menyampaikan pesan kepada khalayak ramai. Dalam dunia politik juru bicara merupakan komunikator. Menurut Gantiano (2018) komunikator politik adalah orang atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan politik yang biasanya berkaitan dengan kekuasaan pemerintah, kebijakan pemerintah, aturan pemerintah, kewenangan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi khalayak baik itu

verbal atau nonverbal. Seperti Husain yang merupakan juru bicara Jusuf Kalla berperan ganda sebagai komunikator politik, diantaranya memberikan kesan melalui pesan dari seorang wakil presiden, kemudian menyebarluaskan kepada media dan kemudian berperan juga sebagai penasihat (advisor) yang bisa bertugas memberikan saran-saran, serta memilih dan memutuskan konten-konten yang pas, sesuai dan layak diunggah ke media sosial meski tanpa memerlukan persetujuan dari Jusuf Kalla.

Berbeda dengan Andi Malarangeng dan Dino Pati Djalal. Sebagai komunikator politik mereka hanya menjadi juru bicara SBY yang dikhususkan pada permasalahan dalam negeri dan luar negeri, sedangkan untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan hal-hal mendasar yang fundamental atau hal-hal yang berkaitan langsung dengan rakyat, SBY memilih melakukan komunikasi politiknya sendiri. Sehingga dapat disimpulkan seorang juru bicara sebagai komunikator politik memiliki berbagai peran, namun mereka memiliki satu kesamaan dari sekian banyak peran tersebut yaitu berbicara untuk kepentingan yang terorganisasi sebagai wakil yang menyampaikan pesan kepada khalayak ramai sehingga memperoleh kepercayaan.

Presidensi G20 Indonesia yang merupakan perhelatan besar dan untuk pertama kalinya Indonesia memegang presidensi membuat pemerintah serius dalam penanganannya. Selain mempersiapkan diri sebagai tuan rumah, pembentukan tim juru bicara juga menjadi

konsentrasi pemerintah. Dalam Kepres Nomor 12 dan Kepres Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Event G20, tercatat bahwa Kementerian Kominfo selaku koordinator dalam bidang komunikasi serta media yang bertugas mengatur pengekseskuan komunikasi yang secara langsung menindaklanjutinya. Strategi dilakukan dengan menunjuk beberapa orang yang kompeten di bidang yang terkait dalam tiga isu prioritas yang akan dibahas dalam Presidensi G20 Indonesia.

Kutipan wawancara Menkominfo tertulis, *"Kami akan berusaha menjalankan tugas dalam mempersiapkan dan mengoordinasikan seluruh aktivitas komunikasi publik dan layanan media selama atau dalam rangka rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia tahun depan,"* menunjukkan keseriusan tindak lanjut dari keputusan presiden. Ditutup dengan pernyataan secara tegas melalui Siaran Pers No. 119/ HM/ KOMINFO/ 03/ 2022 ketika memperkenalkan Maudy Ayunda ke ranah publik, Johnny G Plate menyatakan, *"Juru bicara memegang fungsi yang sangat penting. Sebab, kegiatan perlu dilakukan secara optimal demi mewujudkan Presidensi G20 Indonesia yang sukses baik dari segi substansi maupun penyelenggaraan keketuaan G20."*

## DAFTAR PUSTAKA

Aldianto, L., Raafaldini Mirzanti, I., Sushandoyo, D., & Fitriana Dewi, E. (2018). *Pengembangan Science Dan Technopark Dalam Menghadapi Era Industri 4.0 - Sebuah Studi Pustaka*. Jurnal Manajemen

- Indonesia, 18(1).  
<https://doi.org/10.25124/jmi.v18i1.1261>
- Aldila, N. (2022, April 18). *Posisi Maudy Ayunda Sebagai Jubir G20 Tuai Kritik, Disebut Hanya Gimmick dan Kurang Strategis | Ekonomi*. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com>.
- Alvin, S. (2020). Strategi Komunikasi Politik Juru Bicara Wakil Presiden 2014-2019 sebagai Humas Pemerintah. *Jurnal Komunikasi*, 14(1), 43–62.  
<https://doi.org/10.21107/ilkom.v14i1.6031>
- Antaraneews.com. (2021, November 23). Moeldoko ajak semua pihak fokus perkuat komunikasi G20. *Antara News*. Diakses dari <https://www.antaraneews.com>
- Asmarani, N. G. C. (2022, February 23). Apa Itu Finance Track dan Sherpa Track dalam Forum G-20? Apa Itu Finance Track Dan Sherpa Track Dalam Forum G-20?; *DDTCNews*. Diakses dari <https://news.ddtc.co.id>
- Ayunda, M. (2014, November 9). *Profile*. Maudy Ayunda. Diakses dari <https://www.maudyayunda.com/about/profile/>
- Fernandez, M. N. (2022, January 24). Pemerintah Bentuk Tim Juru Bicara Presidensi G20 | *Ekonomi. Bisnis.com*. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/>
- Gantiano, H. E. (2018). Politikus Sebagai Komunikator Politik. *Dharma Duta*, 16 (1). <https://doi.org/10.33363/dd.v16i1.145>
- Ho, Y., & Rahadiana, R. (2022, April 18). G-20 Role for 27-Year-Old Indonesia Singer Sparks Criticism (1). *Bloomberg.com*. Diakses dari <https://www.bloomberg.com>
- Indrawan, R. M. J. (2018). Komunikasi Politik Kepresidenan: Studi Kasus Komunikasi Politik Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang. *Communitarian*, 1(1).  
<https://doi.org/10.6789/jc.v1i1.74>
- Julina, S. (2022). Komunikasi Internasional Indonesia sebagai Presidensi G-20 Indonesia 2022 ditinjau dari Perspektif Diplomatik. *Jurnal Citra Fikom Jayabaya*, 10(1).
- Kemenlu. (2021, October 1). Presidensi G20 Indonesia | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Kemlu.go.id*. Diakses dari <https://kemlu.go.id>
- Kominfo. (2021, November 26). Menkominfo: Presidensi G20 Indonesia Harus Berkesan dan Beri Memori Indah. *Kominfo.go.id*. Diakses dari <https://www.kominfo.go.id>
- Kominfo. (2022a, January 24). Perkuat Komunikasi Publik Presidensi G20 Indonesia, Menkominfo: Pemerintah Akan Bentuk Tim Juru Bicara. *Kominfo.go.id*. Diakses dari <https://www.kominfo.go.id>
- Kominfo. (2022b, March 31). Perkuat Sosialisasi dan Promosi, Menteri Johnny Perkenalkan Jubir Presidensi G20 Indonesia. *Kominfo.go.id*. Diakses dari <https://www.kominfo.go.id>
- Kominfo. (2022c, April 8). Peran Tim Jubir Presidensi G20 Indonesia untuk Tingkatkan Partisipasi Masyarakat Menyukkseskan Perhelatan G20. *Kominfo.go.id*. Diakses dari <https://www.kominfo.go.id>
- Mulyana, D. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya*. Bandung PT Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, D. (2011). *Komunikasi politik komunikator, pesan, dan media pengantar: Jalaluddin Rakhmat*. PT Remaja Rosdakarya.
- Pertiwi, I. W. (2020). Strategi Komunikasi Interpersonal Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh di Sekolah Dasar, Klaten, Jawa Tengah. *JP3SDM*, 9(2). <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/psikologi/article/viewFile/717/679>
- Putriyantini. (2020, March 6). *Maudy Ayunda Lulus dari Oxford University*. GADIS Magazine. Diakses dari <https://www.gadis.co.id/celeb/94845/maudy-ayunda-lulus-dari-oxford-university->
- Rohman, F. (2021, December 16). Mengulas Apa Itu G20 dan Sejarah Pembentukannya - *Internasional Katadata.co.id*. Katadata.co.id. Diakses dari <https://katadata.co.id>
- Sekretariat Presiden. (2022, March 31). *LIVE:*

*Keterangan Pers Pengenalan Jubir  
Pemerintah untuk Presidensi G20  
Indonesia, 31 Maret 2022.*

Www.youtube.com.

<https://www.youtube.com/watch?v=TCaa4UWhUM0>

Wisnubroto, K. (2021, November 23). Peran Penting dalam Menggaungkan Presidensi G20. *Indonesia.go.id*. Diakses dari <https://www.indonesia.go.id>